

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA OLEH KELOMPOK
KRIMINAL BERSENJATA TERHADAP TENTARA
NASIONAL INDONESIA DI PAPUAI**

SKRIPSI



**Oleh:
Enjelina Panggabean
210710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTRA BATAM
TAHUN 2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH
KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA TERHADAP
TENTARA NASIONAL INDONESIA DI PAPUAI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Enjelina Panggabean
210710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTRA BATAM
TAHUN 2025**

SURAT PERYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Enjelina Panggabean

NPM : 210710008

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA TERHADAP TENTARA NASIONAL INDONESIA DIPAPUAI"

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "dublikasi" dari karya orang lain,

Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Dalam proses pernyataan ini saya buat dengan seharusnya tanpa ada paksaan dari siapapun,

Batam, 17 Juli 2025



Enjelina Panggabean

210710008

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HAK AZASI MANUSIA OLEH KELOMPOK
KRIMINAL BERSENJATA TERHADAP TENTARA
NASIONAL INDONESIA DI PAPUAI**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Enjelina Panggabean
210710008**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 17 Juli 2025



**Padrisan Jamba, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap prajurit TNI di Papua. KKB sebagai aktor non-negara telah melakukan kekerasan seperti penembakan, penyanderaan, dan pembunuhan yang tergolong pelanggaran HAM berat. Namun, perlindungan hukum terhadap TNI sebagai korban masih belum optimal, baik secara preventif maupun represif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis kajian perundang-undangan dan literatur hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan KKB memenuhi unsur pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 Tahun 2000. Sayangnya, upaya penegakan hukum terhadap pelaku masih lemah. Kesimpulannya, negara wajib menjamin hak prajurit TNI sebagai korban HAM melalui mekanisme hukum yang adil dan nondiskriminatif. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip hukum nasional dan HAM internasional, serta penting untuk menciptakan keadilan dan stabilitas di Papua.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, HAM, TNI, KKB, Papua.

ABSTRACT

This study discusses law enforcement regarding human rights violations committed by armed criminal groups (KKB) against TNI soldiers in Papua. As non-state actors, KKB have committed acts of violence such as shootings, hostage-taking, and killings, which constitute gross human rights violations. However, legal protection for TNI soldiers as victims remains suboptimal, both in terms of preventive and repressive measures.

Using a normative legal method based on legislation and legal literature, this study shows that the KKB's actions meet the elements of serious human rights violations according to Law No. 26 of 2000. Unfortunately, law enforcement efforts against the perpetrators remain weak.

In conclusion, the state is obligated to guarantee the rights of TNI soldiers as victims of human rights violations through fair and non-discriminatory legal mechanisms. This protection aligns with national legal principles and international human rights standards and is crucial for fostering justice and stability in Papua.

Keywords: *Law Enforcement, Human Rights, TNI, KKB, Papua.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Kelompok Kriminal Bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia di Papua”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Putra Batam.

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat umum, para penegak hukum, maupun kalangan akademisi, khususnya yang berkecimpung dalam bidang hukum. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putra Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom., CPS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam.
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf di lingkungan Universitas Putra Batam yang telah banyak membantu selama proses studi.

7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mama, yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi tanpa henti. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai.
8. Kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan doa dalam setiap langkah penulis.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan serta referensi ilmiah, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi siapa pun yang membacanya.

Batam, 17 Juli 2025

Hormat penulis,



Enjelina Panggabean

DAFTAR ISI

SURAT PERYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.6.1 Manfaat secara Teoritis,	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1KarangkaTeoritis.....	12
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2 Teori Pelanggaran HAM.....	14
2.1.3 Teori Perlindungan HAM	17
2.2 Kerangka Yuridis	18
2.2.1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999	18
2.2.2 Undang undang 34 Tahun 2004	20
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Berfikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Metode Pengumpulan Data	31
3.3 Alat Pengumpulan Data	34

3.4 Metode Analisis data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Pengaturan Hukum Terhadap batasan Upaya perlindungan diri berdasarkan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak azasi manusia	36
4.1.2 Aspek keadilan Hukum terkait pengaturan perlindungan diri aparat penegak hukum (TNI) Dalam menjalankan tugas berdasarkan undang undang Nomor 34 tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia.....	40
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Relevansi teori perlindungan Hukum Terhadap situasi TNI di Papua.....	45
4.2.2 Analisis Pelanggaran HAM oleh Aktor Non-Negara Menurut Teori Pelanggaran HAM.....	47
4.2.3 Perlindungan Hak Asasi TNI Menurut UU No. 39T ahun 1999 dan UU No. 34 Tahun 2004.....	49
4.2.4 Kesenjangan Equality Before the Law terhadap TNI sebagai Korban HAM	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 KESIMPULAN	57
5.2 SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Metode penelitian	30
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	29
---	----